

Dampak Terintegrasinya Pasar Uang dan Modal terhadap Industri Perbankan Indonesia

Nopirin

Globalisasi

Perkembangan teknologi informasi ekonomi serta semakin terbukanya perdagangan dunia tentu akan sangat mempengaruhi perkembangan dunia. Sudah barang tentu hal ini akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi & perbankan di tanah air. Era Abad 21 merupakan era dunia tanpa batas (*Borderless World*), lalu lintas barang, jasa, uang dan modal antara satu negara dengan negara lain semakin bebas. Era demikian ini sering dinamakan globalisasi (kesejagatan).

Era globalisasi (kesejagatan) ditandai dengan semakin menyatunya negara-negara di dunia sehingga batas-batas negara dalam arti ekonomi, keuangan, investasi sumber daya dan informasi semakin kabur.

Kecenderungan yang demikian ini ditimbulkan oleh adanya :

1. Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dengan dikembangkannya internet, C.D. rom, komunikasi satelit, maka informasi dapat pindah dari satu tempat (negara) ke tempat (negara lain) dalam sekejap. Informasi dapat pindah cepat melalui *information super high way* yang dapat merubah pola bisnis dunia. Dengan *digital cash* uang dapat ditransfer dengan cepat melalui telephone dan satelit. Satu perusahaan yang ingin menjangkau pasar luar negeri tidak harus mengalihkan seluruh usahanya

di luar negeri. Penentuan *design* dan pengendalian mutu dapat dilakukan di negara induk dengan menggunakan satelit dan uang dikirim melalui *electronic transfer*.

Implikasi dari kemajuan ini bahwa dikemudian hari barang dan jasa yang paling berharga adalah yang padat otak (*IQ intensive*). Produk ini sulit dideteksi oleh Kantor Bea Cukai karena dapat ditransfer melalui alat elektronik langsung kepada penerima.

Dalam kondisi yang demikian ini maka setiap negara akan selalu berupaya mencari identitas/keunggulannya untuk dapat bersaing. Deregulasi dan spesialisasi akan banyak dilakukan. Peranan Pemerintah akan semakin kecil dan cenderung akan meningkatkan investasi di bidang pendidikan.

2. Liberalisasi perdagangan

Ide dasar liberalisasi perdagangan sudah ada sejak abad 17, berasal dari ekonom Klasik (Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill dan sebagainya). Dasar pemikiran mereka adalah dengan spesialisasi (yang arah spesialisasinya pada usaha yang memiliki keunggulan) dan perdagangan bebas maka kesejahteraan negara (dunia) akan meningkat. "Trade is an engine of growth".

Usaha-usaha ke arah perdagangan bebas dijalankan mulai tahun 1947 pada pertemuan dunia pertama di

Jenewa yang dicetuskan pembentukan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yakni suatu forum/perundingan untuk pengurangan hambatan-hambatan perdagangan. Selama ini perundingan-perundingan (sering disebut sebagai putaran karena tempatnya berpindah-pindah) telah dilakukan berkali-kali diantaranya di Uruguay tahun 1986 yang disetujui perdagangan bebas tidak hanya di bidang barang tetapi juga jasa. Selanjutnya forum GATT ini dalam perundingan di Marrakesh (Maroko) tanggal 14 April 1994 diganti dengan WTO (World Trade Organization) yang akan berlaku nanti tahun 2020.

Keterlibatan Indonesia dalam era globalisasi ekonomi yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan dan investasi tidak bisa dihindari. Suka tidak suka mau tidak mau, siap tidak siap harus kita hadapi. Untuk itu negara-negara ASEAN (termasuk Indonesia) telah melakukan kerjasama AFTA bahkan dengan negara Asia-Pasifik lainnya menjalin kerjasama ekonomi (APEC). Semuanya ini merupakan langkah menuju ke arah globalisasi ekonomi 2020.

Kerjasama AFTA bahkan dipercepat pelaksanaannya dari tahun 2008 menjadi 2003. Kerjasama ekonomi ini merupakan latihan dalam menghadapi APEC dan juga nantinya globalisasi 2020. Beberapa langkah telah diambil dalam rangka AFTA ini, antara lain perluasan cakupan kerjasama/misalnya sektor pertanian telah dimasukkan/serta kerjasama segitiga pertumbuhan (SIJORI, IMTGT, dan sebagainya). Diharapkan efisiensi dapat meningkat guna menghadapi persaingan yang lebih luas.

Kerjasama APEC dimulai dengan pembicaraan antar menteri ekonomi Asia-Pasifik di Australia tahun 1989 sampai tahun 1992. Pada tahun 1993 Presiden Bill Clinton (USA)

mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Blake Island (USA) dan menghasilkan satu komitmen anggota APEC untuk mendukung keberhasilan Putaran Uruguay (GATT) tentang perdagangan bebas. Hasil pertemuan ini adalah visi ke depan tentang perdagangan bebas. Pertemuan selanjutnya dilakukan di Bogor (Indonesia) tahun 1994 yang menghasilkan satu Deklarasi yakni tekad bersama untuk meletakkan landasan tercapainya visi tersebut di atas. Sasaran jangka panjang yang ingin dicapai adalah liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik. Tindak lanjut dari hasil ini kemudian dirumuskan dalam pertemuan di Osaka (Jepang) yang berupa Agenda Aksi yakni langkah-langkah kongkrit. Prinsip-prinsip yang disetujui APEC meliputi peningkatan kerjasama ekonomi dalam bidang perdagangan dan investasi, agar tercapai sistem perdagangan yang terbuka.

Sebagai kelanjutan dari Putaran Uruguay pada tanggal 14 April 1994 diadakan pertemuan di Marrakesh (Maroko) dan dibentuklah World Trade Organization (WTO) sebagai ganti General Agreement on Trade and Tariff (GATT). Prinsip-prinsip Deklarasi Marrakesh meliputi :

- a) *Cross boarder* artinya eksportir/ produsen bebas masuk ke satu negara.
- b) *Consumption abroad*; setiap orang atau konsumen bebas membeli barang dan jasa termasuk dari luar negeri (impor)
- c) *Commercial presence*; setiap orang bebas mendirikan pabrik, kantor atau perwakilan di negara lain.
- d) *Presence of natural person*; setiap orang bebas untuk berusaha di negara lain.
- e) *Most favoured nation*; yakni tidak ada perlakuan yang berbeda terhadap negara lain.

- f) *National treatment*; perlakuan produsen luar negeri sama dengan produsen dalam negeri.

Dengan prinsip-prinsip di atas maka batas-batas negara (dalam arti ekonomi) tidak ada lagi. Barang dan jasa dapat bebas keluar masuk satu negara. Ditunjang dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dunia seolah-olah tanpa batas. Inilah yang sering diartikan dengan era globalisasi (era kesejagatan). Karena Indonesia telah ikut meratifikasi kesepakatan WTO tersebut, maka kita tidak bisa menghindar lagi dari pelaksanaan prinsip-prinsip di atas. Pertanyaannya : siapkah sektor perbankan kita menghadapi era yang demikian itu ? Untuk menjawab pertanyaan ini, baiklah kita tengok dulu kinerja perbankan Indonesia hingga saat ini.

Kinerja Perbankan di Indonesia

Sistem keuangan Indonesia semasa sebelum deregulasi didominasi oleh perbankan, di mana Bank Pemerintah menguasai $\pm 90\%$ dari asset perbankan. Dominasi ini terutama dikarenakan akses kepada Bank Indonesia dan perusahaan negara serta jaringan yang lebih besar.

Peranan Bank Swasta relatif sangat kecil karena tidak/belum mempunyai akses seperti halnya Bank Pemerintah. Lembaga perusahaan keuangan non Bank (seperti Asuransi dan Dana pensiun) masih kecil sekali.

Kenaikan harga minyak, di satu sisi merupakan penerimaan negara, tetapi di sisi lain telah menimbulkan alokasi dana yang tidak efisien. Kredit likuiditas yang melimpah pada masa itu dilihat dari sisi sasaran Pemerintah untuk mencapai efisiensi di sektor moneter kurang tercapai. Kredit likuiditas adalah kredit yang disubsidi bunganya dan targetnya tertentu yakni untuk mengembangkan program prioritas seperti pengembangan usaha menengah

dan kecil. Dengan demikian dapat terjadi alokasi dana yang kurang efisien yakni terarah pada program yang *returnnya* cenderung rendah. Alokasi yang sudah diarahkan ke target tertentu (dengan demikian tidak mendasarkan pada sistem pasar) secara teoritis tidak akan optimal. Efisiensi alokasinya tidak efisien, *marginal efficiency of investment* tidak sama antar sektor yang dibiayai.

Kondisi di atas mencerminkan adanya *financial repression* serta sistem yang *fragmented*. Alokasi kredit serta tingkat bunga yang diatur serta dominasi Bank Pemerintah merupakan indikator adanya *financial repression*. Kondisi yang demikian ini mengakibatkan efisiensi di sektor moneter tidak efisien.

Setelah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat pada tahun 1970-an, perekonomian Indonesia mendapat pukulan yang berat dari resesi ekonomi dunia serta turunnya harga minyak di pasaran internasional. Keadaan ini memaksa Pemerintah Indonesia mengambil berbagai kebijakan penyesuaian ekonomi makro dalam negeri karena peranan migas dalam perekonomian nasional cukup besar. Pada akhir tahun 1970-an ekspor minyak merupakan $\pm 82\%$ dari total ekspor dan $\pm 72\%$ penerimaan negara berasal dari migas.

Berbagai kebijakan penyesuaian telah dilakukan. Diawali dengan penyesuaian kurs valuta asing (devaluasi tahun 1978), penjadualan beberapa proyek kemudian diikuti dengan deregulasi. Dimulai dengan deregulasi di sektor moneter-perbankan 1 Juni 1983 yang isinya memberikan fleksibilitas kepada perbankan berupa penghapusan pagu kredit, pembebasan penentuan tingkat bunga dan pengurangan kredit likuiditas. Sasaran yang dituju adalah meningkatkan efisiensi serta kemandirian perbankan. Deregulasi perbankan tersebut kemudian diikuti oleh deregulasi lain, yakni di bidang perdagangan serta investasi.

Di bidang perdagangan berupa pergeseran dari non tarif menjadi tarif, penyederhanaan tarif serta upaya memperlancar arus lalu lintas barang.

Proses investasi dari luar negeri disederhanakan serta PMA boleh melakukan investasi dengan modal 100%, terutama untuk produk ekspor.

Pada tahun 1988 deregulasi moneter perbankan tersebut di atas dilanjutkan dengan yang lebih luas lagi dengan mengurangi *barrier to entry* dalam industri perbankan. Perkembangan sektor moneter cukup pesat. Ketegaran di sektor riil menimbulkan ekonomi kepanasan serta masalah-masalah lain diantaranya kualitas portfolio perbankan menurun dan sumber daya manusia. Pemerintah kemudian mengambil kebijaksanaan yang sifatnya hati-hati (*prudential policies*) serta deregulasi lanjutan terutama di sektor riil.

Dari serangkaian kebijakan deregulasi tersebut perkembangan sektor moneter cukup tinggi serta terjadi perubahan/ pergeseran struktur ekonomi Indonesia.

Perkembangan yang pesat dari sektor moneter tersebut dapat diamati dari perkembangan assets, jumlah bank, dana yang dihimpun serta dana yang disalurkan. Semenjak tahun 1987 pertumbuhan rata-rata per tahun untuk assets 29-20% deposito tabungan sebesar 31,46% dan kredit sebesar 31,40%. Angka pertumbuhan tersebut cukup tinggi, apabila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan di dunia perbankan yang dianggap aman yakni 20%. Dilihat dari jumlah bank, perkembangan yang sangat pesat terjadi pada bank swasta nasional. Pada tahun 1986 jumlah bank (termasuk BPR) sebanyak 5902, meningkat menjadi 8993 pada tahun 1995. Perbankan dewasa masih menghadapi masalah ekonomi yang mudah memanas, dan yang lebih penting adalah kredit bermasalah.

Struktur ekonomi Indonesia juga telah mengalami perubahan. Peranan minyak mengalami penurunan dalam GDP

yakni 17% pada tahun 1970 menjadi $\pm 9\%$ pada tahun 1994. Nilai ekspor yang berasal dari minyak turun dari 82% menjadi $\pm 38\%$. Penerimaan negara dari minyak juga mengalami penurunan dari 70% menjadi $\pm 40\%$. Dengan demikian ekonomi Indonesia dapat dikatakan telah bergeser dari ekonomi minyak menjadi bukan minyak.

Cukup melegakan melihat perkembangan di atas. Namun satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah dengan semakin terintegrasinya ekonomi Indonesia dengan ekonomi dunia kebijakan moneter dituntut kehati-hatian yang tinggi.

Peranan pemerintah semakin kecil di bidang moneter, deregulasi dan globalisasi tersebut akan merubah struktur serta pola perbankan Indonesia. Dengan deregulasi yang berlanjut telah membuka peluang munculnya beberapa alternatif pembiayaan, seperti pasar modal, *factoring*, *leasing*, modal ventura serta beberapa jenis sekuritas.

Pasar modal Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Jumlah perusahaan yang go public meningkat dari 24 pada tahun 1985 menjadi 239 pada tahun 1995. Demikian juga nilai transaksi naik dari Rp 3 miliar menjadi Rp 32 trilyun.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuahkan beberapa produk financial baru seperti *digital cash transfer* (*electronic money*). Kemajuan teknologi juga telah membawa dampak semakin banyaknya transaksi uang antar negara serta pembukaan cabang bank di luar negeri. Semuanya ini menyebabkan sektor moneter akan semakin terintegrasi, batas-batas negara menjadi kabur. Ditunjang dengan pelaksanaan prinsip-prinsip WTO pada tahun 2020 nantinya persaingan perbankan semakin tajam.

Bank-bank asing akan semakin banyak bermunculan di Indonesia. Konsumen jasa perbankanpun akan menuntut jasa yang semakin canggih. Untuk menghadapi keadaan tersebut perbankan harus betul-betul menyiapkan

tenaga yang mempunyai etika dan visi ke depan. Disamping itu, dituntut pula penggunaan teknologi baru dan tak ketinggalan melaksanakan restrukturisasi.

Langkah Selanjutnya.

Menghadapi era globalisasi tahun 2020 beberapa hal masih perlu ditingkatkan agar daya saing (efisiensi), baik efisiensi biaya, alokasi kredit dan likuiditas lebih tinggi. Salah satu aspek adalah pengawasan yang baik meliputi personil maupun instrumennya. Di samping itu teknologi dan sistem informasi perbankan perlu dikembangkan, mengingat era globalisasi adalah era teknologi dan informasi. Perbankan akan mengarah ke elektronik banking.

Persaingan yang semakin tajam menuntut restrukturisasi perbankan, efisiensi yang tinggi transparansi dan daya saing perlu ditingkatkan. Dalam alam seperti ini peranan sektor moneter swasta akan semakin membesar. Privatisasi perbankan akan semakin dituntut meskipun dalam persaingan akan selalu diikuti dengan merger, namun tidak akan mengarah pada konsentrasi perbankan. Hal ini mengingat adanya ketentuan untuk merger bahwa assets bank yang tidak boleh melebihi 20% dari assets total/ seluruh bank, sehingga paling sedikit di Indonesia ada 5 bank. Hal ini diperkuat juga oleh satu hasil penelitian bahwa assets bank tidak secara signifikan

mempengaruhi *return*, sehingga tidak ada dorongan kuat suatu bank memperbesar assetnya. Organisasi bank akan cenderung ramping tetapi berotot.

Di bidang alokasi kredit nampaknya tuntutan pemerataan akan semakin membesar. Memang hal ini bagi bank kadangkala merupakan dilema, yang dapat terjadi kemungkinan untuk mengarah pada spesialisasi yang lebih dalam. Bank bukan lagi supermarket yang melayani segala kebutuhan akan tetapi cenderung menekankan pada satu aspek, *corporate* atau *retail banking (core business)*. Selama ini masih terlihat adanya alokasi kredit yang terarah ke sektor yang *returnnya* tinggi sehingga masih cukup banyak kredit yang bermasalah. Untuk masa mendatang kehati-hatian sangat diperlukan. Pengawasan oleh Bank Indonesia perlu semakin ditingkatkan dengan sistem informasi yang baik serta tenaga auditor yang memadai.

Menghadapi abad 21 sektor perbankan harus *sound*. Untuk itu reformasi yang telah dirintis sejak 1983 terus dilanjutkan. Pelaksanaan ketentuan perbankan diupayakan dan selalu dievaluasi.

Akhirnya, kunci upaya untuk menghadapi era globalisasi 2020 adalah pengembangan sumber daya manusia yang mampu menguasai IPTEK dan mempunyai visi ke depan serta menjunjung tinggi moral dan etika bisnis.